

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, atas rahmat dan karunia Allah S.W.T Pemerintah Aceh dapat melaksanakan program kerja Tahun 2019 sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2019 dengan maksimal.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, serta berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini Pemerintah Aceh menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menilai kondisi Kas, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019 ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja tahun 2019.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun 2019 yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2019.
4. Laporan Operasional, menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Aceh tahun 2019 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Aceh.
5. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas Pemerintah Aceh yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir 2019.
6. Laporan Arus Kas, memberikan informasi arus kas bersih dari aktivitas operasional, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan, arus kas bersih dari aktivitas non anggaran, sehingga di ketahui kenaikan/penurunan kas selama periode pelaporan, ditambah saldo kas pada bendahara dan saldo kas BLUD.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan, dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, disertai penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Aceh.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, Juni 2020

Pt. GUBERNUR ACEH

  
Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	viii
LAPORAN KEUANGAN POKOK .....	1
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH .....	1
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .....	3
C. NERACA .....	4
D. LAPORAN OPERASIONAL .....	6
E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	8
F. LAPORAN ARUS KAS .....	9
BAB I PENDAHULUAN .....	12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ....	14
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA .....	18
2.1 Ekonomi Makro .....	18
2.2 Kebijakan Keuangan .....	26
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBA .....	28

		HALAMAN
<b>BAB III</b>	<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....</b>	<b>30</b>
	3.1 Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh.....	30
	3.2 Pencapaian Realisasi Belanja Aceh .....	33
	3.3 Pencapaian Realisasi Belanja Modal .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA .....</b>	<b>44</b>
	4.1 Lingkungan Akuntansi Pemerintah Aceh.....	44
	4.2 Entitas Pelaporan Keuangan .....	44
	4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	45
	4.4 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	45
	4.5 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan .....	46
	4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	48
<b>BAB V</b>	<b>PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>96</b>
	5.1 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	96
	5.2 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	114
	5.3 Penjelasan atas Akun dalam Neraca .....	115
	5.4 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Operasional (LO)..	206
	5.5 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Arus Kas (LAK) ..	221
	5.6 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	226
<b>BAB VI</b>	<b>INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>227</b>
	6.1 Penetapan APBA Tahun Anggaran 2019.....	227
	6.2 Dana Otonomi Khusus (Otsus) .....	228
	6.3 Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA).....	229
	6.4 Aset Helicopter M1-2.....	229
	6.5 PD. Genap Mupakat .....	230

6.6	Penghapusbukuan Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2007 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh .....	231
6.7	Pencatatan Kas Yang Belum Dipertanggungjawabkan Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh .....	232
6.8	Tunggakan pembayaran atas paket pengadaan pada Dinas Pendidikan Aceh .....	232
6.9	Empat Puluh Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang harus dibayarkan.....	232
<b>BAB VII</b>	<b>PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....</b>	<b>234</b>
7.1	Gambaran Umum Provinsi Aceh.....	234
7.2	Visi dan Misi Pemerintah Aceh.....	238
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>241</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	APBA TA 2015-2019 .....	27
Tabel 3.1.	Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2019.....	30
Tabel 3.2.	Realisasi Pendapatan menurut Objek Penerimaan Tahun Anggaran 2019 .....	32
Tabel 3.3.	Pencapaian Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.....	33
Tabel 4.1.	Klasifikasi Kas dan Setara Kas .....	48
Tabel 4.2.	Klasifikasi Piutang.....	50
Tabel 4.3.	Perhitungan Penyisihan Piutang .....	52
Tabel 5.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2018.....	96
Tabel 5.2.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh .....	96
Tabel 5.3.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak .....	97
Tabel 5.4.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi.....	97
Tabel 5.5.	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.....	98
Tabel 5.6.	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Yang Sah.....	99
Tabel 5.7.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer .....	99
Tabel 5.8.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak .....	100
Tabel 5.9.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.....	100
Tabel 5.10.	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ..	101
Tabel 5.11.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	102
Tabel 5.12.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	103
Tabel 5.13.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa .....	103
Tabel 5.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja BLUD .....	105
Tabel 5.15.	Anggaran dan Realisasi Hibah Dalam Bentuk Uang.....	106
Tabel 5.16.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang.....	106
Tabel 5.17.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang.....	107
Tabel 5.18.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal .....	108
Tabel 5.19.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah .....	108
Tabel 5.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	109

Tabel 5.21.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya .....	110
Tabel 5.22.	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer .....	111
Tabel 5.23.	Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya .....	111
Tabel 5.24.	Anggaran dan Realisasi Bantuan Partai Politik.....	112
Tabel 5.25.	Perhitungan SiLPA .....	114
Tabel 5.26.	Rincian Aset Lancar .....	115
Tabel 5.27.	Rekonsiliasi Bank .....	116
Tabel 5.28.	Rincian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan.....	117
Tabel 5.29.	Kas Di Bendahara Penerimaan Yang Telah Disetor .....	118
Tabel 5.30.	Kas DI Bendahara Pengeluaran.....	119
Tabel 5.31.	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran .....	120
Tabel 5.32.	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran .....	121
Tabel 5.33.	Rincian Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran .....	121
Tabel 5.34.	Rekonsiliasi Bank Pada BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin ..	122
Tabel 5.35.	Rekonsiliasi Bank Pada Rumah Sakit Jiwa .....	122
Tabel 5.36.	Rekonsiliasi Bank Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.....	122
Tabel 5.37.	Rekonsiliasi Bank Pada BLUD Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.....	123
Tabel 5.38.	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor .....	124
Tabel 5.39.	Piutang Pajak Air Permukaan .....	124
Tabel 5.40.	Penyisihan Piutang Pajak .....	126
Tabel 5.41.	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAA Yang Sah .....	129
Tabel 5.42.	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	132
Tabel 5.43.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat .....	132
Tabel 5.44.	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat .....	133
Tabel 5.45.	Sewa Dibayar Di Muka .....	134
Tabel 5.46.	Asuransi Dibayar Di Muka .....	135
Tabel 5.47.	Tagihan Penjualan Barang Milik Daerah .....	136
Tabel 5.48.	Penyisihan Piutang Penjualan Barang Milik Daerah .....	137
Tabel 5.49.	Persediaan Barang Pakai Habis .....	137
Tabel 5.50.	Persediaan Bahan Material.....	138
Tabel 5.51.	Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kabupaten/Kota .....	139
Tabel 5.52.	Rincian Aset Tidak Lancar .....	140
Tabel 5.53.	Nilai Bersih Dana Bergulir .....	140
Tabel 5.54.	Rekening Dana PER.....	141
Tabel 5.55.	Saldo Dana PER.....	142
Tabel 5.56.	Saldo Dana PINBUK .....	142

Tabel 5.57.	Sisa Dana PINBUK Yang Belum Dikembalikan.....	143
Tabel 5.58.	Kontribusi Dana PINBUK terhadap PAD .....	143
Tabel 5.59.	Penyertaan Modal Bank Aceh .....	145
Tabel 5.60.	Penyertaan Modal BPR Mustaqim Sukamakmur .....	145
Tabel 5.61.	Penyertaan Modal PD Pembangunan Aceh.....	145
Tabel 5.62.	Mutasi Aset Tetap .....	146
Tabel 5.63.	Mutasi Aset Tetap Tanah.....	147
Tabel 5.64.	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin .....	148
Tabel 5.65.	Mutasi Aset Alat-Alat Berat .....	149
Tabel 5.66.	Mutasi Aset Alat-Alat Angkutan .....	150
Tabel 5.67.	Mutasi Aset Alat-Alat Bengkel dan Ukur.....	151
Tabel 5.68.	Mutasi Aset Alat Pertanian .....	152
Tabel 5.69.	Mutasi Aset Alat-Alat Kantor dan RUMah Tangga .....	153
Tabel 5.70.	Mutasi Aset Alat Studio dan Komunikasi.....	154
Tabel 5.71.	Mutasi Aset Alat Kedokteran .....	155
Tabel 5.72.	Mutasi Aset Alat-Alat Laboratorium .....	156
Tabel 5.73.	Mutasi Aset Alat Persenjataan .....	157
Tabel 5.74.	Mutasi Aset Komputer.....	158
Tabel 5.75.	Mutasi Aset Alat Eksplorasi.....	159
Tabel 5.76.	Mutasi Aset Alat Pengeboran.....	160
Tabel 5.77.	Mutasi Aset Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian ...	161
Tabel 5.78.	Mutasi Aset Alat Bantu Eksplorasi.....	162
Tabel 5.79.	Mutasi Aset Alat Keselamatan Kerja.....	163
Tabel 5.80.	Mutasi Aset Alat Peraga .....	164
Tabel 5.81.	Mutasi Aset Peralatan Proses/Produksi .....	165
Tabel 5.82.	Mutasi Aset Alat Rambu-Rambu .....	166
Tabel 5.83.	Mutasi Aset Peralatan Olahraga.....	167
Tabel 5.84.	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan .....	168
Tabel 5.85.	Mutasi Aset Bangunan Gedung.....	169
Tabel 5.86.	Mutasi Aset Bangunan Monumen .....	170
Tabel 5.87.	Mutasi Aset Bangunan Menara .....	171
Tabel 5.88.	Mutasi Aset Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti.....	172
Tabel 5.89.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	173
Tabel 5.90.	Mutasi Aset Jalan dan Jembatan.....	174
Tabel 5.91.	Mutasi Aset Bangunan Air .....	175
Tabel 5.92.	Mutasi Aset Instalasi.....	176
Tabel 5.93.	Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	178
Tabel 5.94.	Mutasi Aset Buku dan Perpustakaan .....	179
Tabel 5.95.	Mutasi Aset Bercorak Kesenian/Kebudayaan.....	180
Tabel 5.96.	Mutasi Aset Hewan.....	181

Tabel 5.97.	Mutasi Aset Biota Perairan.....	182
Tabel 5.98.	Mutasi Aset Tanaman .....	183
Tabel 5.99.	Mutasi Aset Barang Koleksi Non Budaya .....	184
Tabel 5.100.	Mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi.....	185
Tabel 5.101.	Mutasi Aset BOS .....	186
Tabel 5.102.	Mutasi Aset BLUD .....	187
Tabel 5.103.	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	188
Tabel 5.104.	Akumulasi Penyusutan.....	188
Tabel 5.105.	Rincian Dana Cadangan .....	189
Tabel 5.106.	Aset Kerjasama Dengan Yayasan Tgk. Fakinah .....	192
Tabel 5.107.	Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama .....	193
Tabel 5.108.	Aset Tak Berwujud .....	193
Tabel 5.109.	Rincian Aset Tak Berwujud Lainnya .....	194
Tabel 5.110.	Amortisasi Aset Tak Berwujud.....	196
Tabel 5.111.	Aset Tetap pada KIP, BPKS dan BPKapet .....	198
Tabel 5.112.	Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional.....	198
Tabel 5.113.	Pendapatan Diterima Di Muka .....	200
Tabel 5.114.	Rincian Utang Belanja Pegawai .....	201
Tabel 5.115.	Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa .....	201
Tabel 5.116.	Rekonsiliasi Utang Jangka Panjang.....	202
Tabel 5.117.	Rencana Debt Swap .....	203
Tabel 5.118.	Realisasi Kegiatan Debt Swap .....	203
Tabel 5.119.	Hasil Verifikasi Ulang Realisasi Kegiatan Debt Swap.....	204
Tabel 5.120.	Rincian Hasil Verifikasi Pelaksanaan Debt Swap .....	204
Tabel 5.121.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO .....	206
Tabel 5.122.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Asli Aceh-LO .....	206
Tabel 5.123.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Aceh-LO.....	206
Tabel 5.124.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Aceh-LO .....	207
Tabel 5.125.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO .....	208
Tabel 5.126.	Kenaikan/Penurunan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah-LO .....	208
Tabel 5.127.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer-LO .....	209
Tabel 5.128.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO.....	209
Tabel 5.129.	Kenaikan/Penurunan Dana Bagi Hasil Pajak-LO .....	209
Tabel 5.130.	Kenaikan/Penurunan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO.....	210
Tabel 5.131.	Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Umum-LO .....	210
Tabel 5.132.	Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus-LO.....	211



Tabel 5.133.	Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO	211
Tabel 5.134.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO.....	212
Tabel 5.135.	Kenaikan/Penurunan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO .....	212
Tabel 5.136.	Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO.....	212
Tabel 5.137.	Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO.....	213
Tabel 5.138.	Kenaikan/Penurunan Beban Persediaan-LO.....	213
Tabel 5.139.	Kenaikan/Penurunan Beban Jasa .....	215
Tabel 5.140.	Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan .....	216
Tabel 5.141.	Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas .....	216
Tabel 5.142.	Kenaikan/Penurunan Beban Hibah .....	217
Tabel 5.143.	Kenaikan/Penurunan Beban Bantuan Sosial .....	217
Tabel 5.144.	Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi..	218
Tabel 5.145.	Kenaikan/Penurunan Beban Penyisihan Piutang.....	218
Tabel 5.146.	Kenaikan/Penurunan Beban Transfer .....	219
Tabel 5.147.	Kenaikan/Penurunan Beban Lain-Lain .....	219
Tabel 5.148.	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi TA 2019 dan TA 2018.....	221
Tabel 5.149.	Arus Kas Dari Keluar Aktivitas Operasi TA 2019 dan TA 2018.....	222
Tabel 5.150.	Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2019 Dan TA 2018 .....	223
Tabel 5.151.	Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2019 dan TA 2018 .....	223
Tabel 5.152.	Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2019 dan TA 2018.....	224
Tabel 5.153.	Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar .....	226
Tabel 6.1.	Tahapan Penetapan APBA 2019 .....	227
Tabel 6.2.	Penerimaan Dana Otsus Tahun Anggaran 2008-2019.....	228
Tabel 6.3.	Realisasi JKRA Tahun 2010-2019 .....	229
Tabel 6.4.	Komposisi Saham Baru PD. Genap Mupakat .....	230
Tabel 7.1.	Susunan Satuan Kerja Pemerintah Aceh .....	237

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Aceh (dalam persentase) .....	20
Gambar 2.2	Tingkat Kemiskinan.....	21
Gambar 2.3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Aceh.....	23
Gambar 2.4	Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran dan Persentase Provinsi Aceh .....	24
Gambar 2.5	Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh dan Nasional...	24
Gambar 2.6	Tingkat Inflasi Provinsi Aceh 3 (Tiga) Tahun Terakhir .....	25
Gambar 3.1	Anggaran dan Realisasi APBA Tahun Anggaran 2019 .....	30
Gambar 3.2	Kontribusi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2019 .....	31
Gambar 3.3	Profil APBA TA 2019 Berdasarkan Klasifikasi Fungsi.....	35
Gambar 3.4	Pencapaian Kinerja Menurut Urusan Pemerintahan Aceh.....	40
Gambar 3.5	Pencapaian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 .....	41

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2019
- Lampiran 2 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Hasil Migas Kabupaten/Kota (yang Pendanaannya Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil dan Dana Otonomi Khusus) 2019
- Lampiran 3 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018
- Lampiran 4 Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018
- Lampiran 5 Rincian Piutang BLUD
- Lampiran 6 Rincian Persediaan Barang Habis Pakai
- Lampiran 7a Rincian Persediaan Bahan/Material
- Lampiran 7b Daftar Obat Kadaluarsa Tahun 2019
- Lampiran 7c Daftar Bahan Medis Habis Pakai Tahun 2019
- Lampiran 8 Rincian Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Masyarakat/Kabupaten/Kota
- Lampiran 9 Resume Penyerahan Pengurusan Piutang LUEP Tahun 2019
- Lampiran 10 Aset BRR
- Lampiran 11 Daftar Aset Tak Berwujud
- Lampiran 12 Aset Rusak Berat
- Lampiran 13 Aset Hilang
- Lampiran 14 Aset Hibah
- Lampiran 15 Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Hibah Dan Penghapusan Tahun 2019
- Lampiran 16 Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Hibah Dan Penghapusan Tahun 2020
- Lampiran 17 Extracomtable
- Lampiran 18 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak
- Lampiran 19 Alokasi Dana Otsus Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Lampiran 20 Paket Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang Masih Harus Dibayarkan



## GUBERNUR ACEH

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, Juni 2020

h. Plt. GUBERNUR ACEH h

  
p Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah menjadi jelas. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan luas dengan titik berat otonomi diletakkan pada daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih mandiri, yaitu pengelolaan urusan rumah tangga maupun pengelolaan keuangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menyetujui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Aceh telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 pasal 100, 101, 102, 103 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh pasal 274, Pemerintah Aceh menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 meliputi :

1. **Laporan Realisasi Anggaran**, menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2019, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

1) Pendapatan	: Rp	15.752.800.901.652,15
2) Belanja dan Transfer	: Rp	15.787.883.385.490,16
Defisit	: Rp	(35.082.483.838,01)
3) Pembiayaan	:	
- Penerimaan	: Rp	2.956.538.853.603,71
- Pengeluaran	: Rp	75.314.463.702,32
- Pembiayaan Netto	: Rp	2.881.224.389.901,39

**2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**, menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2019 dengan periode sebelumnya. Dengan realisasi sebagai berikut:

a) Saldo Anggaran Lebih Awal	: Rp	2.954.457.964.942,71
b) Sisa Lebih Anggaran (SiLPA)	: Rp	2.846.141.906.063,38
c) Saldo Anggaran Akhir	: Rp	2.846.141.906.063,38

**3. Neraca**, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Aceh mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2019, sebagai berikut:

a) Aset	: Rp	28.454.501.537.454,90
b) Kewajiban	: Rp	2.745.018.328.614,29
c) Ekuitas	: Rp	25.709.483.208.840,60

**4. Laporan Operasional**, menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan beban selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO	: Rp	19.126.788.168.742,92
b) Beban-LO	: Rp	14.084.312.496.816,94
Surplus dari Operasi LO	: Rp	5.042.475.671.925,98
c) Defisit dari Kegiatan Non Operasional LO	: Rp	(129.155.518.352,80)
d) Surplus LO	: Rp	4.913.320.153.573,13

**5. Laporan Arus Kas**, menggambarkan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan aktivitas pendanaan dan aktivitas non anggaran.

Nilai arus kas bersih berdasarkan aktivitas selama satu Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a) Nilai kas bersih dari Aktivitas Operasi	: Rp	3.105.794.522.989,43
b) Nilai kas bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan	: Rp	(3.196.465.056.258,36)
c) Nilai kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	: Rp	-
d) Nilai kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran	: Rp	-

Saldo kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a) Kenaikan Kas Selama Periode Akuntansi	: Rp	(88.589.644.607,93)
b) Saldo Awal Kas di BUA & Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp	2.918.773.468.198,53
c) Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas Bendahara Pengeluaran	: Rp	2.830.183.823.590,60
d) Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	: Rp	538.687.667,00
e) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp	346.880.461,36
f) Saldo Akhir Kas BLUD	: Rp	15.611.202.011,42
g) Saldo Akhir Kas	: Rp	2.846.680.593.730,38

**6. Laporan Perubahan Ekuitas**, menggambarkan pergerakan ekuitas Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a) Ekuitas Awal	: Rp	20,692,861,279,778,40
b) Surplus/Defisit LO	: Rp	4.913.320.153.573,13
c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	: Rp	103.301.775.489,06
d) Jumlah Ekuitas Akhir	: Rp	25.709.483.208.840,60

7. **Catatan atas Laporan Keuangan**, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan, ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBA, serta ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dan kebijakan akuntansi. Selain itu dalam rangka pengungkapan yang memadai, CaLK juga menyajikan informasi tentang penjelasan atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan, informasi penting dan kewajiban kontinjensi yang mempengaruhi laporan keuangan, serta penjelasan informasi-informasi non keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Banda Aceh, Juni 2020

h: Plt. GUBERNUR ACEH h



Ir. NOVA IRIANSYAH, MT